



Bangun Pendidikan Berkualitas Kadisdikpora Minta Tingkatkan Anggaran

Amlapura (Bali Post) -

Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia. Namun, tanpa didukung anggaran yang memadai, sulit bagi dinas terkait untuk menjawab tantangan membangun pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, pilkada serentak ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem anggaran. Sebab, bila melihat anggaran Disdikpora Karangasem, total anggaran yang sejatinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan hanya 3,96 persen dari total APBD Induk 2015.

Total APBD Induk 2015 Kabupaten Karangasem mencapai Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, data Disdikpora Karangasem menunjukkan plafon anggaran untuk Disdikpora Rp 550,9 miliar atau 43,40 persen. Kemudian, dibagi lagi untuk belanja tidak langsung Rp 500,6 miliar atau 39,44 persen. Sedangkan belanja langsung hanya Rp 50,2 miliar atau 3,96 persen. Anggaran belanja langsung sebesar itu, jelas bukan jawaban untuk menghadapi segudang persoalan pendidikan di Karangasem. Mulai dari kondisi infrastruktur gedung sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, penuntasan buta aksara, hingga penanganan anak putus sekolah.

Bila dicermati lebih jauh, dari Rp 50,2 miliar itu, Rp 26,3 miliar di antaranya adalah berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Yakni, DAK SD Rp 13,3 miliar, DAK SMP Rp 5,9 miliar, DAK SMA Rp 3,1 miliar, dan DAK SMK Rp 3,8 miliar. Jadi, dengan demikian dipastikan belanja langsung di luar DAK dari pemerintah pusat hanya Rp 23,8 miliar atau hanya 1,8 persen dari total APBD Induk 2015 Karangasem. Jauh dari kewajiban yang diamanatkan pemerintah Rp 20 persen.

Dihubungi Rabu (14/10) kemarin, Kadisdikpora Karangasem Gede Ariyasa mengakui kondisi cekaknya anggaran peningkatan kualitas pendidikan di Karangas-

em. Dengan total dukungan anggaran pemerintah daerah hanya 1,8 persen, sulit bagi Disdikpora berbenah menghadapi segudang persoalan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan, politik anggaran ini dapat diperbaiki. Sehingga, eksekusinya ke depan terhadap persoalan pendidikan bisa dituntaskan. Bahkan, Kadisdikpora berani sesumbang, bila besaran anggaran bisa dinaikkan dari Rp 1,8 persen menjadi 8 persen sampai 10 persen, ia sangat yakin mampu menjawab segala persoalan pendidikan di Karangasem. "Saya jamin, tidak ada lagi sekolah rusak dan anak putus sekolah. Dengan kondisi sekarang saja, siswa-siswi kami sudah mampu

berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Apalagi kalau didukung anggaran yang ideal," imbuhnya.

Khusus untuk penanganan anak putus sekolah, kata dia, Disdikpora Karangasem saat ini melakukan upaya baik formal maupun nonformal. Secara formal dengan pendirian program keahlian baru sesuai kebutuhan di setiap kecamatan. Sebab, setelah ditelaah, angka putus sekolah ternyata paling tinggi persentasenya di tingkat SMK. Mereka umumnya memilih langsung bekerja, tanpa menyelesaikan studinya di sekolah. Sedangkan secara nonformal, Disdikpora juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga

swasta dan yayasan. Lembaga ini secara khusus menampung lulusan untuk dididik siap kerja di bidang pariwisata, untuk selanjutnya ditempatkan di sejumlah akomodasi pariwisata yang membutuhkan di Bali sehingga tidak ada alasan bagi siswa untuk putus sekolah. (kmb31)

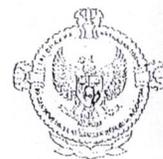


Bali Post/kmb31

Gede Ariyasa

Edisi : KemIs, 15 Oktober 2015

Hal : 13



Dugaan "Mark-UP" di Undiksha

Dua Tersangka Sakit, PH Ajukan Surat Berobat

PENASIHAT hukum (PH) Nyoman Mustiara dan I Dewa Komang Indra, Ketut Ngastawa, Senin (12/10) lalu terlihat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Begitu keluar dari lantai dua ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bali, pengacara senior tersebut mengaku mengajukan surat berobat untuk dua kliennya, yakni Dewa Indra dan Mustiara. "Kalau Kalapas (Kepala Lemaga Pemasyarakatan) sih sudah tanda tangan dan mengizinkannya. Sekarang kami ajukan ke penyidik kejaksaan," tegasnya kala itu.

Dikatakannya, I Dewa Indra yang ditahan di Lapas Kelas II B di Buleleng terjatuh saat berada di kamar mandi. Akibatnya, gigi kliennya itu oleng dan bahkan sampai patah. Ngastawa merasa perlu jika kliennya dibawa ke doter untuk diperiksakan. "Kalau Pak Mustiara, dia memang sakit. Tensinya tinggi, dan kita minta dokter lapas mengecek. Surat permohonan sudah kita ajukan, untuk diperiksa dan suratnya sudah di penyidik," jelasnya.

Disinggung kesiapannya menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Ngastawa mengatakan, selalu siap kapan pun jaksa mengajukannya ke pengadilan. Bahkan jikalau bisa, dia ingin kasus ini cepat disidangkan karena tidak mau berlama-lama. "Klien kami

siap menjalani persidangan, makin cepat makin baik dan klien saya justru ingin cepat," ucap Ketut Ngastawa.

Sebelumnya, kedua tersangka diduga sebagai makelar tanah dalam kasus dugaan *mark-up* pengadaan lahan gedung Fakultas Olahraga dan Keguruan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Pihak Kejati Bali dalam perkara ini menetapkan lima orang tersangka dan semuanya ditahan. Selain Mustiara dan Indra, I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen), Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag

Perencanaan Undiksha) juga dijebloskan ke sel.

Sebagaimana disampaikan Pidsus, mereka diduga melakukan *mark-up* harga tanah dari Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam perkara ini, termasuk rektor dan mantan rektor. Mereka adalah Dr. I Nyoman Jampel, mantan Rektor Prof. I Nyoman Sudiana dan Prof. I Ketut Seken. Selain itu, dua guru besar Undiksha, Prof. Rai dan Prof. Suma juga sudah sempat diperiksa, selain saksi lainnya yang "diundang" ke Kejati Bali. (asa)

Edisi : Kamis, 15 October 2015

Hal : 3



Kasus Korupsi di PT Adhi Karya ✓

Vonis Dinilai Rendah, Jaksa Banding

Denpasar (Bali Post) -

Vonis lima tahun penjara yang diberikan kepada mantan bos PT Adhi Karya Divisi VII (Bali, NTB dan Maluku), Wijaya Imam Santosa, dinilai terlalu rendah oleh jaksa. Pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya meminta supaya majelis hakim menghukum terdakwa dalam dugaan korupsi di internal PT Adhi Karya itu selama 11 tahun. Atas kondisi itu, meski terdakwa sebelumnya sudah menerima, putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena jaksa menyatakan banding.

Hal itu dibenarkan kuasa hukum terdakwa, Edy Hartaka, Rabu (14/10) kemarin. Dikatakannya, pekan lalu keluarga terdakwa Wijaya Imam Santosa mendapat surat dari jaksa, yang pada intinya pemberitahuan bahwa jaksa banding. "Sudah ada surat resmi dari kejaksaan yang menyatakan banding atas kasus ini yang disampaikan pihak keluarga ke kami kuasa hukumnya," ucap Edy saat dimintai konfirmasi

wartawan, kemarin.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menghukum Iman Wijaya dalam dugaan korupsi asuransi yang merembet ke sejumlah proyek, hingga terkuak adanya pembagian *fee* Rp 50 juta ke rekanan yang kalah, serta adanya THR untuk karyawan PT Adhi Karya, dengan hukuman penjara selama lima tahun dan uang pengganti kerugian negara Rp 5,6 miliar. Vonis itu jauh lebih rendah, karena jaksa sebelumnya meminta supaya terdakwa dihukum 11 tahun penjara ditambah mengganti kerugian negara Rp 12 miliar.

Namun dalam putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melawan hukum sesuai tuntutan JPU dalam pasal 2 UU Tipikor. Namun majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa hanya menyalahi kewenangan sesuai pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Terkait pengganti kerugian negara yang dalam tuntutan JPU Rp 12 miliar, juga diabaikan. Majelis hakim berpendapat, hasil audit SPI PT Adhi Karya menghitung keseluruhan kerugian perusahaan BUMN ini. Padahal, komposisi saham di PT Adhi Karya ini adalah 51 persen saham pemerintah dan 49 persen saham publik. Sehingga kerugian yang diderita negara hanya 51 persen dari kerugian keseluruhan dikurangi Rp 600 juta yang sudah dikembalikan terdakwa dari THR (Tunjangan Hari Raya) yang sudah dibagikan. Majelis hakim berpendapat, kerugian negara yang harus diganti terdakwa hanya Rp 5,6 miliar.

Selain itu, majelis hakim juga mengabaikan tuntutan JPU yang menyita seluruh harta terdakwa seperti tanah, mobil dan barang lainnya. Hakim berkeyakinan, JPU tidak mampu membuktikan harta tersebut dari hasil korupsi sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa. (kmb37)

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 3



Kasus Penyewaan Aset Pemprov Bali

Kejari Bidik

Sejumlah Pejabat Pemkab

Gianyar (Bali Post) -

Setelah menetapkan dua tersangka dalam kasus pemalsuan tanda tangan Bupati A.A. Gde Agung Bharata, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan lahan aset Metro Pemprov Bali, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar kini membidik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar untuk dimintai keterangan. Sementara itu pada Selasa (13/10) lalu, Kejari Gianyar sudah melakukan penggeledahan berkas di Kantor Bagian Pertanahan Setda Gianyar.

Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi, Rabu (14/10) kemarin, mengatakan, petugas sudah memeriksa sejumlah pejabat seperti Kabag Pertanahan dan Kabag Keuangan. Langkah ini dilakukan guna mengungkap sepak terjang kedua tersangka yakni Ida

Bagus Nyoman Sukadana (52) dan I Nyoman Pasek Sumer-tana (51) saat masih bertugas di Bagian Pertanahan Setda Gianyar. "Kabag Pertanahan itu kami periksa karena secara langsung saat itu dia adalah atasan kedua tersangka. Selain itu ada juga Kabag Keuan-

gan, terkait aliran uang hasil retribusi yang dipungut kedua tersangka," jelasnya.

Selain dua pejabat tersebut, Kejari Gianyar kini membidik sejumlah pejabat lain untuk ikut diperiksa, seperti Kabag Hukum Setda Gianyar. "Pemeriksaan tersebut guna meminta keterangan terkait adanya paraf Kabag Hukum dalam SK abal-abal yang dibuat kedua tersangka. Termasuk apakah nomor dalam SK abal-abal itu sudah tercatat atau belum dalam surat menyurat di Bagian Hukum," ungkapnya.

Ditambahkannya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan sebab hingga kini, pihaknya belum mendapatkan adanya SK yang menyatakan kedua

tersangka bisa menarik retribusi dari aset yang disewakan. "Jika SK-nya memang tidak ada, apakah jabatan para tersangka ini di Bagian Pertanahan sudah *include* sebagai penarik retribusi?" bebernyanya.

Kini, pihaknya juga berencana memanggil semua penyewa lahan aset Metro Pemprov Bali tersebut, untuk mengetahui apa mereka sudah mendapat penjelasan mengenai alasan penetapan besaran sewa yang diberikan kepada para penyewa itu. "Yang jelas, selama ini, para penyewa sudah membayar, meski mereka tidak tahu jika uang sewa-mereka tidak jelas arahnya. Karena SK penyewaan itu abal-abal," ungkap

Herdian Rahadi.

Sementara itu, penyidik Kejari Gianyar pada Selasa (13/10) siang, ternyata batal menggeledah tiga kantor lainnya, selain Kantor Pertanahan. Pada penggeledahan Selasa pagi itu, Kejari Gianyar hanya menggeledah Kantor Bagian Pertanahan Setda Gianyar. Kini, pihaknya kembali berencana melakukan penggeledahan kantor Bagian Keuangan, Bagian Perwat dan Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu (BPPT) Gianyar. "Yang kemarin baru Pertanahan saja. Ke kantor yang lain bisa jadi menyusul nanti. Namun, itu sesuai hasil penyelidikan dan barang bukti yang kami dapatkan," ujarnya. (kmb35)

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 9



KUA-PPAS 2016

Dewan Temukan Selisih Anggaran

hingga Rp 37 Miliar

Mangupura (Bali Post) –

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi kesepakatan DPRD Badung dengan eksekutif, ternyata tak sesuai yang disepakati. Komisi III DPRD Badung menemukan adanya selisih anggaran Rp 37 miliar dalam KUA-PPAS tersebut. Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria, Selasa (13/10) lalu mengatakan, pihaknya berencana menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas masalah selisih anggaran tersebut.

“Antara KUA-PPAS yang disepakati dengan yang diserahkan ke Dewan ternyata ada selisih hingga Rp 37 miliar,” ujarnya. Menurut-

nya, pembahasan nantinya harus sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Jika ada perbedaan, tegasnya lagi, tentu saja harus dibahas dulu, tak bisa sepihak seperti ini.

Terkait kehadiran Kepala Bappeda dalam raker tersebut, Nyoman Satria menyatakan sangat vital. Kebijakan penggeseran atau penghapusan anggaran ada di tataran Kepala Bappeda. Karena itu, pejabat atau staf di bawahnya dipastikan tidak tahu-menahu. “Kami ingin dengar langsung dari Kepala Bappeda mengenai selisih anggaran ini,” katanya lagi.

Adakah batas waktunya? Jika sampai terus tak mau hadir, kata Satria, KUA-PPAS terancam akan dikembalikan. DPRD Badung, ka-

tanya, dipastikan tidak akan membahas hal-hal yang ada di luar kesepakatan. Saat ditanya soal kenaikan pajak hingga Rp 500 miliar pada 2016, politisi PDI Perjuangan tersebut memaklumi belum bisa terpasang. Hal ini karena perdanya hingga kini belum selesai. Menurutnya, perda ini akan dibahas pada awal-awal 2016. Selanjutnya, perda diperkirakan rampung pada Maret 2016. “Karena itu, kenaikan pendapatan dari pajak baru bisa dipasang pada 2017,” katanya.

Walau belum bisa hingga Rp 500 miliar, pihaknya akan meminta kenaikan pendapatan minimal Rp 200 miliar – Rp 300 miliar. Kenaikan pendapatan ini diharapkan dari pajak hotel, karena se-

lama ini potensi pajak hotel masih jauh di atas realisasi. Selanjutnya, baru dari pajak restoran dan hiburan. Dia tetap memprediksi, potensi pajak hotel di Badung mencapai Rp 6 triliun. “Jika sekarang baru tertagih Rp 2,8 triliun, tentu masih ada yang *lose* atau belum tergarap hingga Rp 3,2 triliun,” pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 3



Opini WTP dan Pembangunan Bali Berkelanjutan

Beberapa daerah kabupaten/kota di Bali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014. Ini menjadi indikasi bahwa daerah-daerah tersebut telah mengelola APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan BPK pun telah melakukan pengauditan berdasarkan standar dalam konteks audit laporan keuangan pemerintah daerah bersifat umum (*general audit*).

Oleh
I Wayan Suartana

Rertanyaannya, apakah dengan opini WTP tersebut bisa berkorelasi dengan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup dan indeks kesejahteraan masyarakat? WTP harus diletakkan pada suatu konstruksi berpikir bahwa pengelolaan keuangan daerah taat aturan dan manfaat secara tidak langsung akan menghasilkan distribusi sumber daya melalui instrumen APBD. APBD sebagai wahana pemacu produktivitas ekonomi menjadi daya ungkit bagi pembangunan daerah. Dalam konteks ini, WTP bukan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi lebih merupakan pintu masuk untuk berkreasi dan berinovasi disertai dengan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam kaitan ini menarik pernyataan Ketua BPK Harry Azis bahwa setiap tahun BPK akan menaikkan persentase audit kinerja pemeriksaan keuangan negara termasuk keuangan daerah di dalamnya (BP, 12/10). Hal ini untuk memastikan setiap anggaran digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Porsi audit kinerja terus diperbesar karena audit keuangan saja (yang melahirkan opini WTP) tidak cukup memastikan anggaran negara digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Di masyarakat muncul kesenjangan harapan karena adanya asimetri informasi. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki mengenai seluk beluk audit, ada suatu persepsi bahwa setiap yang dilakukan oleh pemeriksa akan menghasilkan temuan berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah

dalam menangani persoalan-persoalan riil di masyarakat.

Rakyat kemungkinan belum tereduksi dengan baik berkenaan dengan audit laporan keuangan daerah. Ini menjadi tugas anggota dewan untuk menjelaskan pada konstituennya apa pengertian WTP dan apa saja indikatornya dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh mereka. Harapan masyarakat yang begitu tinggi merupakan sesuatu yang positif. Karena itu berarti mereka masih peduli dan ada intensi untuk berpartisipasi dibandingkan apatisisme berlebihan, partisipasi semu atau terjebak rasa frustrasi yang akan bisa "meledak" sewaktu-waktu. Dimensi harapan bisa berbagai bentuk, misalnya alokasi APBD yang berkeadilan atau katakanlah penganggaran yang tepat guna dan memperbaiki sarana-prasarana yang disfungsional.

Memahami Bali

Opini WTP adalah sesuatu yang penting tetapi belum cukup dalam desain peningkatan kemakmuran rakyat. Audit kinerja menjadi solusi tetapi akan terkendala dalam pengukuran di mana setiap entitas pelaporan kemungkinan mempunyai heterogenitas karakter yang berbeda atau malahan setiap daerah mempunyai balutan kearifan lokal dan kekhasan permasalahan yang berbeda. Misalnya Bali, persoalan ke depan bukanlah semata-mata meningkatkan pendapatan tetapi jauh lebih penting bagaimana Bali bisa mempertahankan *taksu* budaya Balinya secara fisik, nilai-nilai dan dinamika sosial-

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2014

Hal : 8



Sambungan

nya. Karena itu, kalkulasi pembangunan daerah Bali jangan sampai terperangkap pada *mainstream* bagaimana menggenjot pendapatan daerah sebanyak-banyaknya tanpa menghitung nilai kerugian sosial dan lingkungan. Pembangunan Bali berkelanjutan menjadi perhatian kita semua dalam pengarusutamaan pembangunan yang mengimplementasikan nilai-nilai Tri Hita Karana secara utuh. Tidak parsial, apalagi semata-mata untuk pencitraan belaka.

Pembangunan berkelanjutan dirancang untuk memproteksi dan meningkatkan nilai basis sumber daya alam maupun ekonomik lainnya, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendorong pola investasi yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kebijakan dan pengukuran ekonomi daerah Bali seharusnya dirancang untuk memperbaiki integrasi antara pembangunan ekonomi dan aspek keberlanjutannya. Suatu pembangunan yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Bila kita egois dan selalu melakukan rasionalisasi argumen untuk menyatakan diri benar serta memikirkan kebutuhan saat ini saja, maka generasi yang akan datang berteriak atas apa yang kita lakukan saat ini.

Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan harus membuat desain untuk menilai dirinya sendiri. Setiap tahun, daerah wajib mengejar opini WTP tetapi pada saat bersamaan harus juga mengaudit dirinya sendiri (ataupun pihak independen bila tersedia standar yang kredibel), salah satunya audit lingkungan dan sosial. Jika keduanya bisa jalan secara paralel maka kita akan punya model yang bisa menjelaskan dan memprediksi keadaan yang akan datang serta sesuai dengan kebutuhan Bali kekinian. Model tersebut bisa dimasukkan dalam dokumen perencanaan tersistem tidak peduli pergantian pemimpinnya.

Menengok perencanaan anggaran untuk tahun 2016 misalnya, tampaknya masih seperti yang sudah-sudah. Asumsi yang dipatok masih dalam kisaran optimis dengan dua kata kunci yaitu pertumbuhan ekonomi positif dan tingkat inflasi terkendali. Pe-

tumbuhan ekonomi positif akan membuat daerah makin mempunyai ruang untuk memasang volume pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar lagi. Bila semua ini dapat berjalan sesuai dengan yang diasumsikan, tidak perlu ada langkah-langkah darurat yang disiagakan kecuali tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya.

Sebaliknya, bila asumsi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan maka akan berpulang pada cara dan mekanisme mengelola risiko APBD. Maka itu, perencanaan seharusnya lebih banyak memberikan ruang bagi konten dan arah pembangunan Bali berkelanjutan, suatu pembangunan Bali yang tidak tercabut dari nilai-nilai luhur budayanya.

Idealnya proses politik APBD mengutamakan keberlanjutan dan menekan seminimal mungkin terjadinya kesenjangan harapan di mata rakyat.

Akhir tahun 2015 kita sudah punya pemimpin baru di beberapa kabupaten/kota di Bali. Dalam konteks audit laporan keuangan pemerintah daerah, visi pemimpin daerah seharusnya lebih diartikulasikan dalam bentuk komitmen dan politik anggaran untuk menyelamatkan alam Bali. APBD 2016 dan hasil pilkada serentak Desember 2015 hendaknya menjadi strategi momentum solusi banyak hal. Terutama memberikan ruang untuk berkreasi dan mengucapkan "janji suci" tidak keluar dari jati diri pembangunan Bali. Secara lugas dan menggunakan ukuran konvensional, politik anggaran APBD 2016 diharapkan menghasilkan keluaran berupa panjang dan kualitas jalan yang lebih baik, transportasi massal, fasilitas objek wisata lebih nyaman dan pengurangan rumah tangga miskin (RTM), lapangan kerja yang lebih banyak dan penguatan budaya yang lebih sistemik.

Bupati atau wali kota terpilih tidak sekadar mengejar WTP, tetapi lebih jauh lagi bisa membuat sinergi dan saling sapa antara WTP dan kinerja lingkungan, sosial dan budaya.

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 8



Pengelolaan Keuangan Harus Berbasis Akrual

Denpasar (Bali Post) -

Mewujudkan tata kelola keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan, Pemkot Denpasar melaksanakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sebagaimana diketahui, Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjabat Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya mengatakan, tertib yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan taat pada perundang-undangan, pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Gede Geriya mengatakan, untuk menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual maka diperlukan reformasi regulasi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, pemerintah daerah harus sudah menerapkan basis akrual pada pengelolaan keuangan paling lambat tahun 2015.

Geriya juga meminta agar SKPD selaku pengguna anggaran agar lebih memperhatikan dan mencermati peraturan perundang-undangan agar pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD tertib dan transparan. Sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dicapai tiga kali berturut-turut bisa dipertahankan. Untuk dapat melakukan pengawasan, para pimpinan SKPD harus memahami tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan agar semua SKPD bisa memahami regulasi yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual di Kota Denpasar. (kmb12)

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 2



Perbaiki Pasar

Retribusi Parkir Turun

50 Persen



PARKIR - Lokasi parkir di Pasar Kidul Bangli.

Bali Post/sos

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 8



Sambungan

Bangli (Bali Post) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Disubkominfo) Bangli sejak tiga tahun yang lalu terpaksa menurunkan target retribusi parkir. Hal ini sebagai dampak dari perbaikan sejumlah pasar yang berujung pada kurang maksimalnya penataan lahan parkir.

Kadishub Bangli Gede Artha, Rabu kemarin menjelaskan sejak tiga tahun yang lalu target retribusi parkir kisaran Rp 275 juta per tahun. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp 500 juta. "Target retribusi sejak tiga tahun yang lalu turun sekitar 50 persen," katanya.

Turunnya target retribusi ini, kata Artha, tidak terlepas dari kantong-kantong parkir yang mulai berkurang. Retribusi selama ini paling banyak didapatkan dari Pasar Kidul Bangli. Namun, adanya bencana kebakaran pada 2012 lalu, lokasi yang biasanya dijadikan parkir berubah menjadi tempat pedagang. Hal itu menyebabkan lokasi parkir tidak tertata. "Pengendara parkir di sembarang tempat. Kadang tidak dilihat oleh jukir. Mereka tidak bayar jadinya," terangnya.

Penurunan target ini ditafsirkan akan berakhir setelah pembangunan pasar selesai. Saat itu, pedagang yang kini berjualan di lantai dasar pasar akan dipindahkan ke ruko yang sudah disediakan. "Kalau pembangunan pasar sudah selesai, rasanya retribusi itu kembali normal seperti dulu. Kami juga akan merancang pembayaran parkir satu pintu," ungkapnya.

Lanjut Artha, retribusi parkir dari Pasar Kintamani juga mengalami penurunan. Namun, angkanya tidak terlalu banyak. Penyebabnya pun dikatakan sama, yakni karena sempitnya lahan parkir. Sesungguhnya, untuk di pasar Kintamani ini sudah tersedia lahan parkir. Namun, jalan masuknya sangat curam, sehingga pengendara tidak berani melintas. "Retribusi parkir Pasar Kintamani juga turun. Penyebabnya

sama, lahan parkir yang tidak tertata," ucapnya.

Sementara itu, untuk pasar Kayuambua Susut dan Pasar Yangapi Tembuku, retribusi parkirnya masih stabil. Sebab, di pasar itu tidak ada pembangunan yang mengorbankan lahan parkir. "Retribusi di

dua pasar ini masih stabil," paparnya. Pejabat asal Kintamani ini juga menyebutkan untuk menambah pendapatan, pihaknya membuka sejumlah kantong parkir di lingkungan kota. Salah satunya di sekitar taman kota. "Agar pendapatan dari parkir tidak kecil sekali,

sejumlah lokasi di lingkungan kota dipungut parkir," cetusnya. Selain lingkungan taman kota, sesungguhnya lokasi parkir di sepanjang Jalan Brigjen Ngurah Rai bisa dikenakan retribusi. Sayangnya, dalam mencari jukir sangat sulit. (kmb45)

Edisi : Kamis, 15 Oktober 2015

Hal : 8